

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Literatur

- Agus Sardjono. 2014. Yetty Komalasari Dewi. Pengantar Hukum Dagang, Jakarta, : PT Raja Grafindo Persada.
- Andriani Nurdin. 2012. *Kepailitan BUMN Persero berdasarkan asas kepastian hukum*. Bandung: P.T, Alumni.
- Andjar Pachta. 2008, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chabib Soleh & Heru Rochansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PPRPDN).
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rianato Adi. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ronny Hantijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudmuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Cetakan ke-9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa,
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa,
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum
Badan Usaha Milik Daerah,

C. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5768c92b8757d/ayopahami-prinsip-prinsip-pendirian-bum-desa> di akses hari sabtu, 17 September 2016 pukul 10:11 Wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usahadi akses hari Sabtu 02 April 2016 pukul 20:13Wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaandi> akses hari Sabtu 02 April 2016 pukul 20:20 Wib.

<http://www.bukupedia.net/2016/07/pengertian-ciri-ciri-dan-contoh-perum-perusahaan-umum.html>di akses hari Rabu 04 Januari 2017 pukul 17:20 Wib.

D. Jurnal

AmeliaSriKusumaDewi. 2015. *Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta: Jurnal Media Hukum

